



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BU PATI GORONTALO
NOMOR 79 TAHUN 2017
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 /PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018

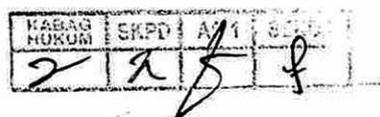


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gorontalo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan pemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

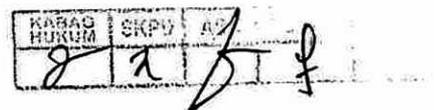
Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$ = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi



- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

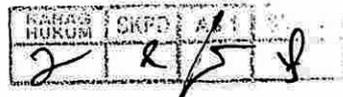
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten/kota.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten/kota.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten/kota.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten/kota.



Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Gorontalo ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
 - a. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Peraturan Desa mengenai APBDes
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahun



Anggaran Tahap II dari Kepala Desa disertai capaian output 75 keuangan dan 50% Fisik.

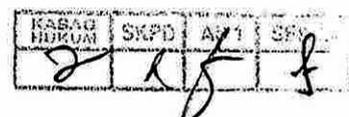
- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (7) Dalam hal table referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan table referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pengaturan lebih lanjut terkait prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.
- (3) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (4) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.



Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (3) Penyerapan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk upah kerja minimal 30% (tiga puluh per seratus) dari total biaya pekerjaan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I, tahap II dan tahap III.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana



dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

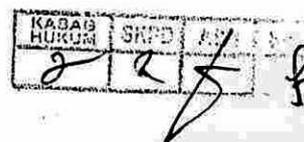
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada Bupati.

BAB VI

SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda

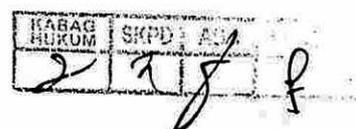


sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.



- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

| | | |
|-------|-----|----|
| KORAS | SWA | AN |
| 2 | R | f |

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,

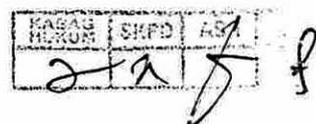
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUH. RAHMAT I. BULOTO
NIP. 19700805 199903 1 006

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.



PERATURAN BUPATI GORONTALO
TAHUN 2017

URUTAN TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2018

BESARAN DANA DESA SE-KABUPATEN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2018

(ribu rupiah)

| Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Afirmasi | Alokasi Formula | Pagu Dana Desa per-Desa |
|----------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| TELAGA | BULILA | 616.345 | 0 | 97.200 | 713.545 |
| TELAGA | MONGOLATO | 616.345 | 0 | 145.350 | 761.695 |
| TELAGA | LUHU | 616.345 | 0 | 243.453 | 859.798 |
| TELAGA | HULAWA | 616.345 | 0 | 245.661 | 862.006 |
| TELAGA | PILOHAYANGA | 616.345 | 0 | 178.674 | 795.019 |
| TELAGA | DULAMAYO SELATAN | 616.345 | 157.549 | 437.299 | 1.211.193 |
| TELAGA | DULAMAYO BARAT | 616.345 | 157.549 | 287.955 | 1.061.849 |
| TELAGA | DULOHUPA | 616.345 | 0 | 110.090 | 726.435 |
| TELAGA | PILOHAYANGA BARAT | 616.345 | 0 | 148.311 | 764.656 |
| BATUDAA | ILUTA | 616.345 | 0 | 207.370 | 823.715 |
| BATUDAA | BUA | 616.345 | 0 | 170.911 | 787.256 |
| BATUDAA | HUNTU | 616.345 | 0 | 133.381 | 749.726 |
| BATUDAA | PAYUNGA | 616.345 | 0 | 222.472 | 838.817 |
| BATUDAA | BARAKATI | 616.345 | 0 | 180.084 | 796.429 |
| BATUDAA | ILOHUNGAYO | 616.345 | 0 | 210.779 | 827.124 |
| BATUDAA | DUNGGALA | 616.345 | 0 | 217.934 | 834.279 |
| BATUDAA | PILOBUHUTA | 616.345 | 0 | 205.380 | 821.725 |
| TIBAWA | ISIMU UTARA | 616.345 | 0 | 312.607 | 928.952 |
| TIBAWA | ISIMU SELATAN | 616.345 | 0 | 250.012 | 866.357 |
| TIBAWA | DATAHU | 616.345 | 0 | 360.071 | 976.416 |
| TIBAWA | TOLOTIO | 616.345 | 0 | 201.319 | 817.664 |
| TIBAWA | LABANU | 616.345 | 0 | 407.308 | 1.023.653 |
| TIBAWA | REKSONEGORO | 616.345 | 0 | 116.383 | 732.728 |
| TIBAWA | BUHU | 616.345 | 0 | 409.827 | 1.026.172 |
| TIBAWA | DUNGGALA | 616.345 | 0 | 201.999 | 818.344 |
| TIBAWA | MOLOWAHU | 616.345 | 0 | 266.680 | 883.025 |
| TIBAWA | ILOPONU | 616.345 | 0 | 467.531 | 1.083.876 |
| TIBAWA | ILOMATA | 616.345 | 0 | 281.170 | 897.515 |
| TIBAWA | MOTILANGO | 616.345 | 0 | 290.710 | 907.055 |
| TIBAWA | ISIMU RAYA | 616.345 | 0 | 244.348 | 860.693 |
| TIBAWA | BALAHU | 616.345 | 0 | 325.259 | 941.604 |
| TIBAWA | BOTUMOPUTI | 616.345 | 0 | 307.626 | 923.971 |
| TIBAWA | ULOBUA | 616.345 | 0 | 302.198 | 918.543 |
| BATUDAA PANTAI | TONTAYUO | 616.345 | 315.098 | 177.061 | 1.108.504 |
| BATUDAA PANTAI | BILUHU TIMUR | 616.345 | 0 | 354.306 | 970.651 |
| BATUDAA PANTAI | KAYUBULAN | 616.345 | 0 | 342.710 | 959.055 |
| BATUDAA PANTAI | BONGO | 616.345 | 0 | 184.508 | 800.853 |
| BATUDAA PANTAI | LOPO | 616.345 | 0 | 144.795 | 761.140 |
| BATUDAA PANTAI | LAMU | 616.345 | 0 | 227.143 | 843.488 |
| BATUDAA PANTAI | OLIMOO'O | 616.345 | 0 | 146.939 | 763.284 |
| BATUDAA PANTAI | BUHUDAA | 616.345 | 157.549 | 198.356 | 972.250 |
| BATUDAA PANTAI | LANGGULA | 616.345 | 0 | 154.621 | 770.966 |
| BOLIYOHUTO | SIDOMULYO | 616.345 | 0 | 78.425 | 694.770 |
| BOLIYOHUTO | PARUNGI | 616.345 | 0 | 173.446 | 789.791 |
| BOLIYOHUTO | DILONIYOHU | 616.345 | 0 | 197.698 | 814.043 |
| BOLIYOHUTO | SIDODADI | 616.345 | 0 | 139.357 | 755.702 |
| BOLIYOHUTO | POTANGA | 616.345 | 157.549 | 286.729 | 1.060.623 |
| BOLIYOHUTO | MOTODUTO | 616.345 | 0 | 148.419 | 764.764 |
| BOLIYOHUTO | ILOHELUMA | 616.345 | 0 | 186.239 | 802.584 |
| BOLIYOHUTO | MONGGOLITO | 616.345 | 0 | 109.075 | 725.420 |
| BOLIYOHUTO | BANDUNG REJO | 616.345 | 0 | 185.477 | 801.822 |
| BOLIYOHUTO | DULOHUPA | 616.345 | 0 | 103.411 | 719.756 |

| Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Afiriasi | Alokasi Formula | Pagu Dana Desa per-Desa |
|-------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| BOLIOHUTO | SIDOMULYA SELATAN | 616.345 | 0 | 102.487 | 718.832 |
| BOLIOHUTO | BONGONGOAYU | 616.345 | 0 | 96.586 | 712.931 |
| BOLIOHUTO | TOLITE | 616.345 | 0 | 186.167 | 802.512 |
| TELAGA BIRU | DULAMAYO UTARA | 616.345 | 157.549 | 231.617 | 1.005.511 |
| TELAGA BIRU | ULAPATO A | 616.345 | 0 | 242.335 | 858.680 |
| TELAGA BIRU | ULAPATO B | 616.345 | 0 | 166.193 | 782.538 |
| TELAGA BIRU | TALUMELITO | 616.345 | 0 | 189.759 | 806.104 |
| TELAGA BIRU | TULADENGGI | 616.345 | 0 | 278.147 | 894.492 |
| TELAGA BIRU | PANTUNGO | 616.345 | 0 | 161.767 | 778.112 |
| TELAGA BIRU | LUPOYO | 616.345 | 157.549 | 289.979 | 1.063.873 |
| TELAGA BIRU | PENTADIO TIMUR | 616.345 | 0 | 222.633 | 838.978 |
| TELAGA BIRU | PENTADIO BARAT | 616.345 | 0 | 249.868 | 866.213 |
| TELAGA BIRU | DUMATI | 616.345 | 0 | 236.669 | 853.014 |
| TELAGA BIRU | MODELIDU | 616.345 | 0 | 145.415 | 761.760 |
| TELAGA BIRU | TINELO | 616.345 | 0 | 188.675 | 805.020 |
| TELAGA BIRU | TIMUATO | 616.345 | 0 | 181.397 | 797.742 |
| TELAGA BIRU | TAPALULUO | 616.345 | 0 | 149.391 | 765.736 |
| TELAGA BIRU | TONALA | 616.345 | 157.549 | 220.487 | 994.381 |
| BONGOMEME | DULAMAYO | 616.345 | 157.549 | 201.511 | 975.405 |
| BONGOMEME | UPOMELA | 616.345 | 157.549 | 337.805 | 1.111.699 |
| BONGOMEME | TOHUPO | 616.345 | 157.549 | 276.197 | 1.050.091 |
| BONGOMEME | MOLANIHU | 616.345 | 315.098 | 229.286 | 1.160.729 |
| BONGOMEME | MOLOPATODU | 616.345 | 315.098 | 188.390 | 1.119.833 |
| BONGOMEME | MOLAS | 616.345 | 0 | 275.266 | 891.611 |
| BONGOMEME | BATULAYAR | 616.345 | 157.549 | 283.072 | 1.056.966 |
| BONGOMEME | BATULORENG | 616.345 | 315.098 | 174.308 | 1.105.751 |
| BONGOMEME | BONGOULAWA | 616.345 | 0 | 253.688 | 870.033 |
| BONGOMEME | OTOPADE | 616.345 | 157.549 | 231.713 | 1.005.607 |
| BONGOMEME | HUNTULOHULAWA | 616.345 | 157.549 | 155.986 | 929.880 |
| BONGOMEME | OWALANGA | 616.345 | 157.549 | 208.296 | 982.190 |
| BONGOMEME | LIYODU | 616.345 | 315.098 | 202.596 | 1.134.039 |
| BONGOMEME | LIYOTO | 616.345 | 0 | 225.681 | 842.026 |
| BONGOMEME | KAYUMERAH | 616.345 | 157.549 | 308.214 | 1.082.108 |
| TOLANGOHULA | SUKAMAKMUR | 616.345 | 0 | 185.661 | 802.006 |
| TOLANGOHULA | LAKEYA | 616.345 | 0 | 186.784 | 803.129 |
| TOLANGOHULA | GANDASARI | 616.345 | 0 | 266.439 | 882.784 |
| TOLANGOHULA | MOLOHU | 616.345 | 157.549 | 209.912 | 983.806 |
| TOLANGOHULA | POLOHUNGO | 616.345 | 0 | 311.627 | 927.972 |
| TOLANGOHULA | BINA JAYA | 616.345 | 0 | 361.104 | 977.449 |
| TOLANGOHULA | TAMAILA | 616.345 | 0 | 294.024 | 910.369 |
| TOLANGOHULA | SIDOARJO | 616.345 | 0 | 343.300 | 959.645 |
| TOLANGOHULA | SUKAMAKMUR UTARA | 616.345 | 0 | 257.351 | 873.696 |
| TOLANGOHULA | MARGOMULYA | 616.345 | 0 | 116.350 | 732.695 |
| TOLANGOHULA | MAKMUR ABADI | 616.345 | 0 | 150.882 | 767.227 |
| TOLANGOHULA | GANDARIA | 616.345 | 0 | 158.206 | 774.551 |
| TOLANGOHULA | OMBULO TANGO | 616.345 | 0 | 197.397 | 813.742 |
| TOLANGOHULA | TAMALIA UTARA | 616.345 | 0 | 200.889 | 817.234 |
| TOLANGOHULA | HIMALAYA | 616.345 | 157.549 | 223.985 | 997.879 |
| MOOTILANGO | PARIS | 616.345 | 0 | 285.084 | 901.429 |
| MOOTILANGO | HELUMO | 616.345 | 0 | 255.919 | 872.264 |
| MOOTILANGO | PILOMONU | 616.345 | 157.549 | 444.626 | 1.218.520 |
| MOOTILANGO | SATRIA | 616.345 | 0 | 161.219 | 777.564 |
| MOOTILANGO | KARYAMUKTI | 616.345 | 0 | 115.811 | 732.156 |
| MOOTILANGO | TALUMOPATU | 616.345 | 0 | 234.755 | 851.100 |
| MOOTILANGO | SIDOMUKTI | 616.345 | 0 | 157.659 | 774.004 |
| MOOTILANGO | PAYU | 616.345 | 0 | 330.300 | 946.645 |
| MOOTILANGO | SUKAMAJU | 616.345 | 0 | 167.804 | 784.149 |
| MOOTILANGO | HUYULA | 616.345 | 157.549 | 310.255 | 1.084.149 |
| PULUBALA | PONGONGAILA | 616.345 | 0 | 286.227 | 902.572 |
| PULUBALA | PULUBALA | 616.345 | 0 | 385.376 | 1.001.721 |
| PULUBALA | MOLAMAHU | 616.345 | 0 | 297.691 | 914.036 |
| PULUBALA | BAKTI | 616.345 | 0 | 473.671 | 1.090.016 |
| PULUBALA | TRIDHARMA | 616.345 | 0 | 126.824 | 743.169 |
| PULUBALA | MOLALAHU | 616.345 | 0 | 233.690 | 850.035 |
| PULUBALA | MULYONEGORO | 616.345 | 0 | 424.480 | 1.040.825 |
| PULUBALA | PUNCAK | 616.345 | 0 | 308.664 | 925.009 |
| PULUBALA | TOYIDITO | 616.345 | 0 | 309.604 | 925.949 |

KABUPATEN
MURUNG
SKPD
ASPI
SEKDA
WAB
2018

| Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Afiriasi | Alokasi Formula | Pagu Dana Desa per-Desa |
|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| PULUBALA | AYUMOLINGO | 616.345 | 0 | 216.937 | 833.282 |
| PULUBALA | BUKIT AREN | 616.345 | 0 | 279.258 | 895.603 |
| LIMBOTO BARAT | PONE | 616.345 | 0 | 186.279 | 802.624 |
| LIMBOTO BARAT | HUIDU | 616.345 | 0 | 238.221 | 854.566 |
| LIMBOTO BARAT | OMBULO | 616.345 | 0 | 315.197 | 931.542 |
| LIMBOTO BARAT | DAENAA | 616.345 | 0 | 807.577 | 1.423.922 |
| LIMBOTO BARAT | YOSONEGORO | 616.345 | 0 | 111.511 | 727.856 |
| LIMBOTO BARAT | TUNGGULO | 616.345 | 0 | 211.462 | 827.807 |
| LIMBOTO BARAT | HUTABOHU | 616.345 | 0 | 341.724 | 958.069 |
| LIMBOTO BARAT | PADENGO | 616.345 | 0 | 195.951 | 812.296 |
| LIMBOTO BARAT | HAYA-HAYA | 616.345 | 0 | 310.167 | 926.512 |
| LIMBOTO BARAT | HUIDU UTARA | 616.345 | 157.549 | 205.258 | 979.152 |
| TILANGO | TUALANGO | 616.345 | 157.549 | 123.556 | 897.450 |
| TILANGO | DULOMO | 616.345 | 0 | 74.772 | 691.117 |
| TILANGO | TILOTE | 616.345 | 157.549 | 188.201 | 962.095 |
| TILANGO | TABUMELA | 616.345 | 157.549 | 562.481 | 1.336.375 |
| TILANGO | ILOTIDEA | 616.345 | 0 | 205.594 | 821.939 |
| TILANGO | LAUWONU | 616.345 | 157.549 | 150.714 | 924.608 |
| TILANGO | TENGGELA | 616.345 | 0 | 232.784 | 849.129 |
| TILANGO | TINELO | 616.345 | 157.549 | 151.165 | 925.059 |
| TABONGO | TABONGO TIMUR | 616.345 | 157.549 | 559.034 | 1.332.928 |
| TABONGO | TABONGO BARAT | 616.345 | 0 | 285.301 | 901.646 |
| TABONGO | LIMEHE BARAT | 616.345 | 0 | 125.246 | 741.591 |
| TABONGO | LIMEHE TIMUR | 616.345 | 0 | 333.715 | 950.060 |
| TABONGO | ILOMANGGA | 616.345 | 0 | 241.913 | 858.258 |
| TABONGO | MOTINELO | 616.345 | 157.549 | 298.529 | 1.072.423 |
| TABONGO | MOAHUDU | 616.345 | 0 | 227.463 | 843.808 |
| TABONGO | TERATAI | 616.345 | 0 | 179.592 | 795.937 |
| TABONGO | LIMEHU | 616.345 | 157.549 | 161.937 | 935.831 |
| BILUHU | BILUHU BARAT | 616.345 | 157.549 | 316.732 | 1.090.626 |
| BILUHU | LOBUTO | 616.345 | 157.549 | 247.275 | 1.021.169 |
| BILUHU | BILUHU TENGAH | 616.345 | 157.549 | 358.167 | 1.132.061 |
| BILUHU | LULUO | 616.345 | 0 | 146.699 | 763.044 |
| BILUHU | HUWONGO | 616.345 | 157.549 | 225.581 | 999.475 |
| BILUHU | LOBUTO TIMUR | 616.345 | 157.549 | 197.717 | 971.611 |
| BILUHU | BOTU BOLUO | 616.345 | 0 | 139.319 | 755.664 |
| BILUHU | OLIMEYALA | 616.345 | 0 | 179.272 | 795.617 |
| ASPARAGA | BULULI | 616.345 | 157.549 | 245.756 | 1.019.650 |
| ASPARAGA | MOHIYOLO | 616.345 | 0 | 203.710 | 820.055 |
| ASPARAGA | PANGAHU | 616.345 | 0 | 141.081 | 757.426 |
| ASPARAGA | KARYA INDAH | 616.345 | 157.549 | 200.802 | 974.696 |
| ASPARAGA | PRIMA | 616.345 | 157.549 | 207.850 | 981.744 |
| ASPARAGA | TIOHU | 616.345 | 157.549 | 191.128 | 965.022 |
| ASPARAGA | OLIMOHULO | 616.345 | 0 | 196.177 | 812.522 |
| ASPARAGA | KARYA BARU | 616.345 | 157.549 | 232.671 | 1.006.565 |
| ASPARAGA | BONTULA | 616.345 | 0 | 277.817 | 894.162 |
| ASPARAGA | BIHE | 616.345 | 157.549 | 212.618 | 986.512 |
| TALAGA JAYA | HUTADAA | 616.345 | 0 | 106.727 | 723.072 |
| TALAGA JAYA | BUHU | 616.345 | 0 | 95.258 | 711.603 |
| TALAGA JAYA | LUWOO | 616.345 | 0 | 135.892 | 752.237 |
| TALAGA JAYA | BUNGGALO | 616.345 | 0 | 111.409 | 727.754 |
| TALAGA JAYA | BULOTA | 616.345 | 0 | 143.882 | 760.227 |
| BILATO | TOTOPO | 616.345 | 157.549 | 180.855 | 954.749 |
| BILATO | BILATO | 616.345 | 0 | 190.232 | 806.577 |
| BILATO | ILOMATA | 616.345 | 157.549 | 166.948 | 940.842 |
| BILATO | TAULA'A | 616.345 | 0 | 176.069 | 792.414 |
| BILATO | JURIYA | 616.345 | 157.549 | 173.583 | 947.477 |
| BILATO | PELEHU | 616.345 | 157.549 | 174.231 | 943.125 |
| BILATO | BUMELA | 616.345 | 157.549 | 241.718 | 1.015.612 |
| BILATO | LAMAHU | 616.345 | 157.549 | 259.736 | 1.033.630 |
| BILATO | MUSYAWARAH | 616.345 | 0 | 119.760 | 736.105 |
| BILATO | SUKA DAMAI | 616.345 | 157.549 | 231.640 | 1.005.534 |
| DUNGALIYO | PILOLALENGA | 616.345 | 0 | 251.592 | 867.937 |
| DUNGALIYO | KALIYOSO | 616.345 | 0 | 177.277 | 793.622 |
| DUNGALIYO | DUNGALIYO | 616.345 | 0 | 246.865 | 863.210 |
| DUNGALIYO | AMBARA | 616.345 | 157.549 | 319.684 | 1.093.578 |
| DUNGALIYO | BONGOMEME | 616.345 | 0 | 239.384 | 855.729 |

KABUPATEN
BURUM
2 2 f f

| Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Afirmasi | Alokasi Formula | Pagu Dana Desa per-Desa |
|--------------|------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| DUNGALIYO | DUWANGA | 616.345 | 157.549 | 164.036 | 937.930 |
| DUNGALIYO | AYUHULA | 616.345 | 0 | 245.142 | 861.487 |
| DUNGALIYO | PANGADAA | 616.345 | 0 | 243.694 | 860.039 |
| DUNGALIYO | BOTUBULOWE | 616.345 | 0 | 289.327 | 905.672 |
| DUNGALIYO | MOMALA | 616.345 | 157.549 | 213.813 | 987.707 |
| Total | | 117.721.895 | 9.295.391 | 43.931.883 | 170.949.169 |


 BUPATI GORONTALO,
 NELSON POMALINGO


 Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH
 NIP. 197008051999031006